

TESIS

**URGENSI PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI
SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

**ASMUNI
NIM : 2220215310064**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2024

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL 10 JULI 2024**

PEMBIMBING



**Prof. Dr. Hj. Mulyani Zaleha, S.H., M.H.
NIP. 197505250021 2 002**

DIKETAHUI OLEH

**KOORDINATOR
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUF1, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Judul Tesis : Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam
Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika.**

Nama : ASMUNI

NIM : 2220215310064

**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Mulyani Zaleha, S.H., M.H.
NIP. 197505250021 2 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Megister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 19903 1 004**

**Dekan Program Megister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19720208 19903 1 004**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmuni
NIM : 2220215310064
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan


Asmuni
NIM. 2220215310064

ASMUNI, 2024. “Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mulyani Zaleha, S.H., M.H. 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Urgensi, Pihak Kepolisian, Saksi Persidangan, Pidana Narkotika.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika, yang cenderung memberatkan tersangka/terdakwa saat saksi dihadirkan dalam persidangan berbeda dengan saksi saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma hukum sehingga perlu adanya kepastian hukum agar masyarakat tidak bingung dan ragu terhadap aturan hukum yang ditetapkan. Kekaburan norma hukum terjadi antara Pasal 185 Ayat (1) tentang keterangan saksi dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 Pasal 1 angka 10 tentang saksi penyidikan. Secara umum saksi pihak kepolisian tidak diatur dalam KUHAP namun diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan berbeda dengan saksi saat BAP sama-sama memberatkan tersangka/terdakwa sehingga tersangka/terdakwa sangat dirugikan untuk itu perlu adanya keadilan bagi hakim dalam memutus perkara narkotika. Kejahatan narkotika perlu penanganan khusus (*lex specialis*), hanya pihak kepolisian Perkara tindak pidana narkotika ini bersifat khusus (*lex Specialis*), sehingga tidak sembarang orang yang bisa menangkap, melidik dan menyidik sampai terbentuk sebuah keterangan yang tersusun dengan kata lain berita acara pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa kembali apakah sudah benar dan memiliki unsur pidana dengan melampirkan alat bukti yang sah sebagai dasar dakwaan dan tuntutan di persidangan yang berwenang untuk menangani perkara ini.

Sehingga pihak kepolisian dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. saksi alami sendiri, ia lihat. Penanganan perkara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dengan intruksi pemerintah dan program pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi tumbuh pesatnya narkotika.

ASMUNI, 2024. "The Urgency of the Police as Witnesses in Narcotics Crime Case Trials". Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mulyani Zaleha, S.H., M.H. 102 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Urgency, Police, Trial Witnesses, Narcotics Crime.

The aim of the thesis research entitled The Urgency of the Police as Witnesses in Trials of Narcotics Crime Cases, which tends to incriminate suspects/defendants when witnesses are presented in court, which is different from witnesses when making Investigation Reports (BAP). The type of research that the author uses is normative legal research. In this research, there is ambiguity in legal norms so that there is a need for legal certainty so that people are not confused and doubtful about the legal rules that have been established. The blurring of legal norms occurs between Article 185 Paragraph (1) concerning witness statements and National Police Chief Regulation number 6 of 2019 Article 1 number 10 concerning investigative witnesses. In general, police witnesses are not regulated in the Criminal Procedure Code but are regulated in Police Chief Regulation number 6 of 2019.

*The results of the research obtained are that the statements of witnesses presented in the trial are different from those of witnesses during the BAP, which both incriminate the suspect/defendant so that the suspect/defendant is greatly disadvantaged, therefore there needs to be justice for judges in deciding narcotics cases. Narcotics crimes require special handling (*lex specialis*), only the police. This narcotics crime case is special (*lex Specialis*), so that not just anyone can arrest, search and investigate until a written statement is formed, in other words, an investigation report (BAP), which is then handed over to the prosecutor's office to re-examine whether it is correct and contains criminal elements by attaching valid evidence as the basis for the indictment and demands at the court which has the authority to handle this case.*

So that the police are present at the trial to provide information as the information given by the witness at the trial must be based on what he saw, heard and experienced himself and not based on the opinions, thoughts, conjectures or assumptions of the witness. natural witness himself, he saw. Handling of narcotics cases is based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, in accordance with government instructions and government programs to reduce and overcome the rapid growth of narcotics.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala makhluknya dengan memberikan hidayah dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam proses penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh pengetahuan, masukan dan pendapat serta arahan dari pembimbing untuk penyempurnaan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua dosen dan rekan-rekan pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada :

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang sangat Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyani Zaleha, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan sekaligus anggota tim penguji Tesis, yang dengan kesabaran dan kesungguhan serta di sela-sela kesibukan berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Rahmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis, yang telah bersedia untuk menguji dalam sidang tesis di Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, SH., M.Hum., selaku anggota tim penguji tesis, yang telah bersedia untuk menguji dalam sidang tesis di Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, krititk dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak, akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan penelitian maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis,

Asmuni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Keaslian Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	20
F. Metode Penelitian	53
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	56

BAB II URGENSI PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI DALAM

PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	58
A. Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan	58
B. Saksi Meringankan Dan Saksi Memberatkan Dalam Persidangan	72
BAB III KETERANGAN PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI	
DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA	
NARKOTIKA DAPAT BERNILAI ALAT BUKTI	79
A. Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Narkotika	79
B. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi	85
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA